

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DI KELURAHAN

CIKORO KABUPATEN GOWA

FAHRIL YUSUF

105641111317



PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DI KELURAHAN
CIKORO KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh

Fahril Yusuf

No Stambuk: 105641111317

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

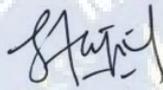
PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro
Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Fahril Yusuf
Nomor Induk Mahasiswa : 105641111317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamrun, S.IP., M.SI



Ahmad Taufik, S.IP., M.AP.

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor 0234/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 28 Februari 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si

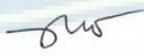

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM:730727

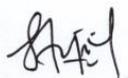
992797

Tim Penguji:

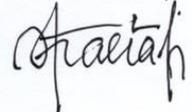
1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

()

2. Hamrun, S.IP., M.Si

()

3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

()

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahril Yusuf
Nomor Stambuk : 105641111317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 20 juni 2023

Yang menyatakan

Fahril Yusuf

ABSTRAK

Fahril Yusuf, Hamrun, Ahmad Taufik. Efektivitas Penggunaan Anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penggunaan anggaran kelurahan Cikoro dalam meningkatkan kualitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Adapun hasil penelitian yaitu Produktivitas aparat dalam melaksanakan penggunaan anggaran di Kelurahan Cikoro dapat dikatakan baik. Kemampuan adaptasi kerja Kelurahan Cikoro sudah memiliki kemampuan adaptasi kerja yang cukup baik yaitu kemampuan pegawai akan menentukan anggaran Kelurahan. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai. Kepuasan kerja di kantor Cikoro yaitu Karyawan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi/perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, bahkan pengendali untuk mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan dalam menggunakan anggaran dengan baik. Kemampuan berlaba Kelurahan Cikoro, perangkat kelurahan hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan dengan meningkatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan. Kelurahan Cikoro sumber dayanya sudah cukup baik dan memang tidak terdapat dasar peraturan yang mengatur tentang pemilihan sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pemungut pajak

Kata kunci: Efektivitas, anggaran, produktivitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmat-nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda M Yusuf dan Ibunda Arifa sebagai motivator yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberikan semangat serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ahmad Harakan S.IP, M.HI selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hamrun. S. IP., M. Si selaku pembimbing I dan Ahmad Taufik. S. IP., M. AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Lurah Mukhlis, S.H M.M , Terima kasih atas informasi yang di diberikan
7. Kepada seluruh staf Kelurahan Cikoro dan Masyarakat terim kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan
8. Terima kasih kepada IPC yang telah kebersamai penulis selama kurang lebih 4 tahun, serta kepada seluruh teman-teman dan terkhusus sahabat saya Al-Akbar dan Putri Sania terima kasih suka dukanya selama waktu perkuliahan penulis
9. Serta semua keluarga, sahabat, teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Makassar, 22 November 2023

Yang menyatakan

Fahril Yusuf



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik pengumpulan data	24
F. Teknik analisis data.....	25

G. Keabsahan data.....	26
BAB IV HASIL Dan PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi lokasi penelitian.....	27
B. Hasil Penelitian	35
1. Produktivitas.....	37
2. Kemampuan Adaptasi Kerja.....	42
3. Kepuasan Kerja	46
4. Kemampuan Berlaba	49
5. Pencarian Sumber Daya.....	52
C. Pembahasan	57
1. Produktivitas.....	57
2. Kemampuan Adaptasi Kerja.....	57
3. Kepuasan Kerja	58
4. Kemampuan Berlaba	59
5. Pencarian Sumber Daya.....	60
BAB V KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA_	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk membangun kemajuan serta menjaga ketertiban sosial agar masyarakat dapat menjalani kehidupan bernegara. Seperti pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan salah satu bidang Pemerintahan. Dengan bertambah luas kewenangan ini, maka aparat Pemerintahan di daerah di harapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan tugas dan wewenang dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Hutapea C, 2022).

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan yang selalu menekankan peranan pemerintah mengakibatkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui sistem pengelolaan dana desa dalam hal penganggaran untuk pembangunan desa. Pelaksanaan ini untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, dimana memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat (Krisnawati et al., 2019)

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh

mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini berarti masyarakat dan aparatur pemerintahan kelurahan harus bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengurus rumah tangga kelurahan, sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut (Umiani & Sujana, 2021)

Konsep tata kelola Pemerintahan atau *good governance* adalah suatu rujukan yang dapat menjadi pengelola aktivitas Pemerintahan yang baik, serta dengan adanya tata kelola pasti akan menghindari kesalahan-kesalahan terutama dalam alokasi anggaran (Bima, 2014). Berdasarkan pada peraturan pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal, Kelurahan dan untuk pemberdayaan masyarakat (Sugianto S, 2019). Dana Kelurahan ini untuk mendukung profesionalitas Aparatur dan kemandirian Daerah, dalam hal ini dana Kelurahan untuk penguatan Pemerintah Daerah.

Transparan artinya adalah anggaran di kelurahan itu dapat dikelola secara terbuka, partisipasi artinya dapat mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, atau pelaksanaan anggaran Kelurahan tersebut baik tanggung jawab dari petugas-petugas maupun dari Pemerintah Kelurahan (Salindeho, 2020).

Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa negara masih kurang optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Program-program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan senyatanya masih jauh dari yang di harapkan, mulai bantuan raskin, pendidikan gratis sampai jaminan kesehatan belum mampu membuat masyarakat berkehidupan lebih layak (Safi', Indien Winarwati, 2015)

Alokasi anggaran kelurahan sudah pasti ada setiap tahunnya, yang mana alokasi anggaran kelurahan ini digunakan untuk kebutuhan operasional perangkat Kelurahan dan berbagai program serta kegiatan dari Kelurahan itu sendiri. Dalam mengelola dan mengatur alokasi anggaran Kelurahan harus memenuhi beberapa indikator penting seperti transparan, akuntabilitas dan partisipasi (Andhika, 2017). Hal ini sangat di pengaruhi oleh kemampuan perangkat Kelurahan dalam mengelola alokasi anggaran Kelurahan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari alokasi anggaran Kelurahan itu sendiri.

Permasalahan dalam alokasi anggaran di Kelurahan Cikoro adalah masih kurang nya partisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan yang ada, sehingga membuat program yang dilaksanakan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan, dalam transparansi sepertinya masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan jelas, sehingga ini yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya informasi yang jelas, seperti tidak terpasangnya spanduk atau baliho mengenai anggaran yang akan digunakan.

Selain itu, akuntabilitas atau pertanggung jawaban pihak kelurahan mengenai pelaporan anggaran yang telah digunakan, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk Kelurahan cukup menarik perhatian karena jumlah anggarannya besar, dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mengenai ini perlu pertanggung jawaban yang dilakukan dengan baik dan mengenai pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Permata, 2022).

Pemerintah Kelurahan Cikoro merupakan salah satu tempat pemerintah untuk dapat berhubungan langsung dengan masyarakat karena Kelurahan merupakan lembaga Pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, dan untung melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang di berikan oleh Camat dan melakukan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada. Selai itu Pemerintah Kelurahan juga harus memberikan suatu kegiatan yang positif kepada masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis di Kelurahan Cikoro.

Adapun anggaran setiap tahunnya yang berikan kepada kelurahan cikoro mencapai 684 Juta, dengan anggaran yang cukup besar ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan perekonomian di kelurahan cikora sehingga kelurahan cikoro mampu bersaing dengan kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa.

Kemudian agar masyarakat juga mengetahui bagaimana program program yang dijalankan Pemerintah Kelurahan Cikoro dan dapat meningkatkan

tingkat kepercayaan masyarakat, serta memberikan arahan yang jelas terkait terkait kegiatan yang di adakan pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam program atau kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah Kelurahan, sehingga dapat terwujud efektivitas penggunaan anggaran Kelurahan yang baik dan memiliki akuntabilitas dalam alokai anggaran Kelurahan tersebut.

Oleh karena itu, lokasi penelitian di Kelurahan Cikoro menjadi sangat menarik untuk di angkat dan di teliti karna berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Cikoro, Kelurahan Cikoro juga menjadi menarik karna merupakan tempat wilaya administratif yang berarti sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu, anggaran yang di alokasikan juga cukup besar kepada kelurahan sehingga membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut. Masyarakat kelurahan akan sangat terjaga kesejahteraannya dengan adanya efesiensi penggunaan anggaran Pemerintah Kelurahan yang baik di Kelurahan Cikoro. Dari permasalahan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Tata kelola Pemerintah Kelurahan yang baik, maka Kelurahan Cikoro haruslah transparan dalam mengelola dana Kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah Efektivitas penggunaan anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas penggunaan anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Manfaat untuk Pemerintah yaitu dengan adanya hasil penelitian ini akan memudahkan Pemerintah mencari bahan evaluasi mengenai Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.
- b) Manfaat untuk masyarakat yaitu agar masyarakat dapat mengambil peran dalam membantu pelaksanaan Alokasi Anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa .

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan masukan serta menambah pengetahuan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya mengenai “Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

no	Nama	Judul	Keterangan
1	sugianto 2019	tata kelola anggaran Desa bersumber APBN dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat pinggiran berbasis pemerataan pembangunan pedesaan dalam perspektif nawa cita (studi kasus di wilayah ciayumajakuning)	untuk mengetahui tata kelola anggaran Desa yang bersumber APBN dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat pinggiran berbasis Pemerataan pembangunan pedesaan dalam perspektif nawa cita dalam peran Pemerintah Desa dalam menjalankan program nawa cita tentang pembangunan masyarakat pinggiran terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Desa berbasis kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan.
2	(Zulaida & Nurmala Sari, 2021)	“Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Denai

		Denai Kota Medan	<p>apakah sudah menrapkan prinsip good goernance dan apakah tahapan pengelolaan dana Kelurahan sudah sesuai dengan Kemendagri No. 130 tahun 2018 serta bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai dalam pengelolaan dana Kelurahan pada tahun 2019. Adapun hasil yang diperoleh bahwa yaitu dalam pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan pengelolaan dana Kelurahan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> yaitu dimana Pemerintah Kelurahan melaksanakan transparansi kepada masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan dana Kelurahan dan akuntabilitas dalam mengelola dana Kelurahan serta partisipatif dalam mengikut sertakan masyarakat dalam musrembang Kelurahan.</p>
3	(Londa, 2020)	peningkatan sarana dan prasana dan pemberdayaan	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan

	masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malayang Kota Manado	masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malayang penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif dengan menggali atau membangun suatu profesi atau menjelaskan menjelaskan makna di balik realita. Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data (informan), adalah pegawai yang bekerja di pemerintah Kelurahan mulai dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, bagian Pemerintahan Lurah kepada- kepala lingkungan serta kepada kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana Kelurahan.
--	---	---

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai

1. Penelitian terdahulu membahas mengenai tata kelola anggaran desa sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai anggaran keluarahan
2. Efektivitas penggunaan anggaran Kelurahan namun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih di fokuskan pada efektivitas

Tata Kelola Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

3. Penelitian terdahulu membahas mengenai peningkatan sarana dan prasarana dalam membangun desa atau kelurahan sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai anggaran.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah ketetapan penggunaan, hasil atau menunjang tujuan efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah di raih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu.

Bila di telusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- 1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan.
- 2) Penggunaan metode/ cara, sarana/ alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal.

Menurut Gibson dkk (1996) konsep konsep efektivitas dalam organisasi dapat di lihat dari tiga sudut pandang yaitu: efektivitas individu, efektivitas kelompok, efektivitas organisasi.

- 1) Pandangan dari segi efektivitas menekankan pada hasil kerja anggota tertentu dari organisasi, tugas yang harus di laksanakan biasanya di tetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi.

Efektivitas individu di nilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil kerja yang merupakan dasar bagi promosi, kenaikan gaji dan imbalan lainnya.

- 2) Pandangan dari segiefektivitas kelompok melihat efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.
- 3) Pandangan dari segi efektivitas organisas imelihat efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok dari pendapat ini jelas bahwa ada tiga tingkatan analisis tentang efektifitas yaitu individu,kelompok dan organisasi.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. Alokasi anggaran kelurahan

Alokasi anggaran merupakan dana yang berasal dari APBD daerah yang di berikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) NO. 73 Tahun 2005 pasal 9 menyebut bahwa Keuangan kelurahan bersumber dari:

- 1) APBD Kabupaten/Kota yang di alokasikan sebagaimana perangkat Daerah lainnya
- 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan pihak ketiga
- 3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya:

- 1) Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
- 2) Luas wilayah
- 3) Kondisi geografis/karakteristik wilayah
- 4) Jenis dan volume pelayanan
- 5) Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

4. Konsep Tata kelola pemerintahan

Konsep tata kelolah Pemerintahan atau good governance adalah sebuah rujukan yang dapat menjadi pengelola aktivitas Pemerintahan yang baik, dan dengan adanya tata kelolah pasti akan menghindari kesalahan-kesalahan terutama dalam alokasi anggaran berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasara lokal, Kelurahan, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan Tata kelolah sendiri adalah tata Pemerintahan, penyelenggaraan, atau manajemen (pengelolaan) dalam suatu Pemerintahan tata Pemerintah yang baik yaitu dapat melaksanakan fungsi Pemerintah secara baik, bersih, dan bertanggung jawab baik itu dalam struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain sebagainya. Istilah “governance” yang berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan dan juga mengandung arti sebagai suatu kegiatan dan juga mengandung arti sebagai pengurus, pengelolaan, pengarahan, dan juga di artikan sebagai Pemerintahan. Pemerintahan yang bersih adalah Pemerintahan yang transparan,jujur, dan bertanggung jawab (Charles Hutapea 2022).

Menurut Krina (2003) menyatakan bahwa tata Pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembag-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di

antara mereka. Tata kelola Pemerintahan pada tingkat lokal (Pemerintah Daerah) berada pada model tata kelola menuntut partisipasi masyarakat yang aktif melalui ketrlibatan secara langsung atau tidak langsung (Fung,2008; Michels & Graaf , 2010; Tholen,2015). Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif maka tata kelola Pemerintahan akan berjalan dengan baik karna telah mendapat dukungan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

4. Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan

1. Perencanaan

Pemerintah kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Kelurahan disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada Kelurahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran Kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran Kelurahan dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas Kelurahan. Jika Kelurahan yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara Kelurahan. Bendahara Kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pertanggung jawaban

Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan. Peraturan Kelurahan disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah kelurahan berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

5. Indikator-indikator Tata kelola pemerintahan

Menurut sadarmayanti (2012:7) dalam (Yuliana, 2013) terdapat empat unsur atau prinsip utama Tata kelola Pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi organisasi/perusahaan

Untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang di tetapkannya.

2. Transparansi

Adalah adanya kemampuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan yang bersifat transparan kepada masyarakat dengan adanya akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat untuk setiap kebijakan Pemerintah.

3. Partisipasi

Yaitu sebuah organisasi atau perusahaan yang menghendaki terbukanya sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan sebuah kritik terhadap Pemerintah yang di nilainya tidak transparan.

4. Supremasi Hukum

Adalah Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang di tempuh (Yuliana, 2013).

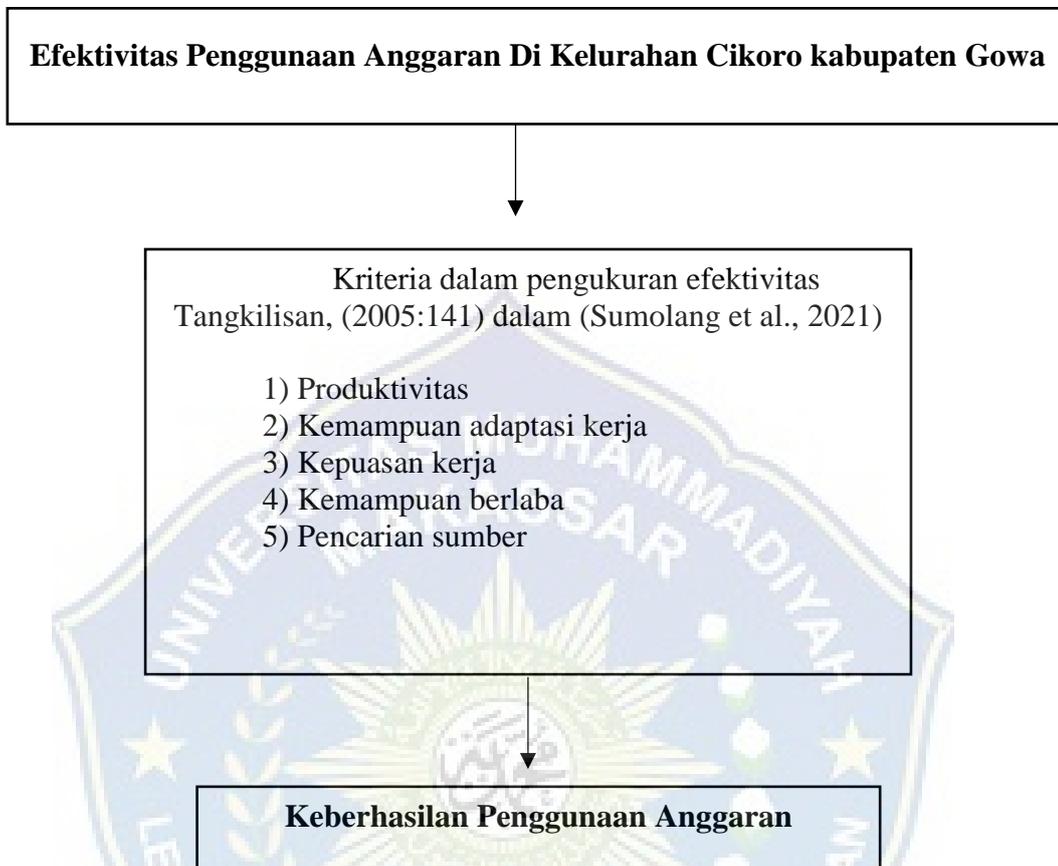
Tata kelola atau pengelolaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep tata kelolah Pemerintahan atau good governance adalah sebuah rujukan yang dapat menjadi pengelola aktivitas Pemerintahan yang baik, dan dengan adanya tata kelola pasti akan menghindari kesalahan-kesalahan terutama dalam alokasi anggaran

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal, Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dana Kelurahan ini untuk mendukung profesionalitas aparatur kemandirian Daerah, dalam hal ini dana Kelurahan untuk penguatan Pemerintah Daerah (Charles Hutapea 2022).

C. Kerangka Pikir

Secara spesifik untuk Pengelolaan Dana Kelurahan diatur secara rinci dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam Undang-undang Dasar 1945. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi.

Dimana pengelolaan dana Kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dimana pada tahap Perencanaan pemerintah kelurahan menyusun perencanaan pembangunan kelurahan untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Efektivitas Penggunaan Anggaran Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro menggunakan pendekatan Produktivitas, Kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan berlabar, Pencarian sumber.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Produktivitas yaitu efisiensi pengelolaan masukan dan efektivitas pencapaian sasaran yang berhubungan upah tenaga kerja, pengalaman, curahan waktu kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dengan yang telah ditetapkan hingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh.
2. Kemampuan adaptasi kerja yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi yang ada di sekitar kita.
3. Kepuasan kerja Yaitu sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja
4. Kemampuan berlaba yaitu Kemampuan berlaba Kemampuan berlaba sebenarnya merupakan kondisi sejauhmana faktor pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, faktor kedua yaitu produktivitas kerja, dan faktor ketiga yaitu kepuasan kerja telah dimiliki oleh para karyawan sehingga terlihat hasil kerja mereka.
5. Pencarian sumber daya yaitu mengukur bagaimana tanggapan pegawai terhadap kebutuhan masyarakat di kantor kelurahan Cikoro

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan Setelah seminar proposal. Penelitian ini berlokasi di Kantor Lurah Cikoro Kabupaten Gowa dan lebih terfokus pada kelurahan dalam hal ini yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam hal efektifitas penggunaan anggaran di kelurahan Cikoro menggunakan anggaran di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa. Data yang akan dicari atau yang akan diperoleh terkhusus pada data yang ada pada kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Anggaran di Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka sehingga peneliti akan terjun langsung di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang diteliti

terkait Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti akan melakukan

Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenarnya atau memberikan informasi yang paling relevan di lapangan terkait penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan sebagai upaya penyesuaian kebutuhan data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dengan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan terkait penelitian yang dilakukan, pencatatan dokumen-dokumen atau arsip di Kelurahan, serta dapat diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud dari penelitian yaitu

tentang Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Mukhlis,S.H.MM	Lurah	MK
2	Musdalifah,S.Sos.MM	Sekretaris Lurah	MS
3	Hamsir	Dusun	HS
4	Farida	Masyarakat	FR
5	Hj Supu	Masyarakat	HJ

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informasi yang diambil sebagai sampel

baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Di Kelurahan Cikoro sehingga menunjang relevannya data yang diperoleh. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang terpenting. Reduksi data juga merupakan suatu proses pemilihan data, penyederhanaan, dan pengabstrakan data dimana data yang diambil hanya data yang berkaitan dengan focus penelitian yang dilakukan secara manual dari catatan-catatan di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat yang bersifat naratif guna memahami apa yang terjadi secara lebih muda.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang kebenaran sebuah informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Contohnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan informan, observasi, atau teknik lainnya dilain waktu dengan keadaan yang berbeda.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambar Peta kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40

derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Profil Kelurahan Cikoro

a. Keadaan Geografis

Kelurahan Cikoro merupakan salah satu Kelurahan dari delapan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (SulSel). Kelurahan ini beribukota di Cikoro jarak dari Malakaji ibukota Kecamatan sejauh lima km.

Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah 17,33 km persegi merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu, luas ini setara 13,08 persen luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan, 12 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Cikoro sebagian besar wilayahnya berada pada lereng, dengan batas-batas wilayah sebagai Berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malakaji
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rappolemba
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Secara morfologi daerah ini lebih dari 90% terdiri dari media berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 1000,50 meter dari atas permukaan laut. Dengan curah hujan sedang yaitu rata-rata 2.500 sampai 3.000 mm setiap tahunnya, dengan suhu udara rata-rata berada pada 10 C sampai 15C.

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduk sebanyak 3.932 jiwa/orang, yang terdiri atas 2.004 jiwa laki-laki, dan perempuan sebanyak 1.928 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 821 orang. Untuk lebih jelasnya mengenal keadaan penduduk Desa Cikoro berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Komposisi penduduk berdasarkan Tingkat Usia Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah	Presentasi
		Laki	PR		
1	< 4 Tahun	150	162	310	7.9
2	5-9 Tahun	220	225	510	12.8
3	10-14 Tahun	345	320	665	14,7
4	15-24 Tahun	450	487	927	22.1
5	25-49 Tahun	324	250	570	27,4
6	50-54 Tahun	178	289	467	8.2
6	55 Ketas	146	120	266	6.9
Jumlah		1.813	1.853	3.666	100

Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro Tahun 2023

Dengan demikian tampak bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, dengan selisih sebesar 76 orang. Apabila dilihat dari penduduk berdasarkan usia, maka penduduk di Kelurahan tersebut lebih didominasi oleh penduduk yang berusia muda dan hanya sebagian kecil yang berusia lanjut

c. Tugas Pokok Kelurahan

1. Lurah

mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah fungsi dari lurah:

- 1) Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- 5) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- 6) Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Sekretaris

mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian. Berikut adalah fungsi dari sekretaris:

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan;
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran;
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan Dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah fungsi dari seksi pemerintahan dan kemasyarakatan:

1. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan
7. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan;

8. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
9. Pengumpulan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
10. Pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
11. Pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
12. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

4. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Berikut adalah fungsi dari seksi ekonomi dan pembangunan;

1. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

3. Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan kelurahan;
4. Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
5. Pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan;
6. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan keteriban kelurahan. Berikut adalah fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum:

1. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam;

4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di kelurahan.

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 struktur Organisasi Kelurahan Cikoro



B. Hasil Penelitian

Efektivitas pengelolaan APBN dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas APBN adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan APBN yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas

pembangunan yang diinginkan. Dalam perencanaan APBN, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana yang sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020 ini ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran bagi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 Ayat (1) Huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk kelurahan paling sedikit 5%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan pengelolaan dana kelurahan.

Dengan demikian, pengelolaan dana kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Adapun indikator dari penelitian ini yaitu Produktivitas,

Kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan berlabar, Pencarian sumber daya.

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barangbarang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Hasibuan (dalam Busro, 2018), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktu bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.

Produktivitas kerja aparat merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktivitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah Kelurahan yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Berikut Data Anggaran masing-masing data di Kecamatan Tombolo tahun 2023

no	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah anggaran per kelurahan		total
		Dau Tambahan	APBD	
	Kecamatan Tombolo	732,000.000.00	636.475.078.00	1.368.475.075.078
1	Kelurahan Malakaji	366,000,000,00	318,273,539,00	684,237.539.00
2	Kelurahan Cikoro	366,000,000,00	318,273,539,00	684,237.539.00

Sumber: kantor kelurahan cikoro

Dari hasil penelitian dilapangan, baik dari hasil observasi, wawancara maupun dari telah dokumen yang ada di kelurahan Cikoro diperoleh data bahwa secara umum pemerintah keluarahn cikoro telah menerapkan prinsip produktivitas penggunaan anggaran yang cukup baik khususnya dalam perencanaan anggaran yang termuat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja kelurahan.

Pemulihan ekonomi yang dimaksudkan adalah melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, pembentukan dan pengembangan pengelolaan BUMD serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Sedangkan untuk program prioritas nasional diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendataan desa dan pemetaan sumber daya alam, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam diwujudkan dalam bentuk kegiatan mitigasi bencana dan pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Hal ini di sampaikan oleh informan bapak Lurah Cikoro yang mengatakan bahwa:

“produktivitas yang ada di kelurahan cikoro khususnya bagi pegawai itu sudah lumayan bagus karena pegawai selalu di tegaskan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini” (hasil wawancara oleh informan MK pada tanggal 23/02/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa aparat Kelurahan Cikoro cukup memiliki skill dalam menjalankan tugas-tugasnya. Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi pegawai cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standar kinerja.

Sikap tersebut berasal dari persepsi mereka mengenai pekerjaannya dan hal ini tergantung pada tingkat outcomes intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja/pegawai memandang outcome tersebut dan mencerminkan perasaan mereka terhadap pekerjaannya. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Hal ini dijelaskan dan di sampaikan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“umumnya para pegawai di Kelurahan Cikoro memiliki rasa malu apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal namun berbeda dengan sikap yang ditunjukkan. Kadangkala arogan yang di tampilkan kepada warga masyarakat, ini disebabkan ada saja oknum aparat yang pilih kasih dalam tata cara melayani sehingga

muncul kesan “tak kenal maka tak sayang” (hasil wawancara oleh informan HS pada tanggal 24/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Tanggapan warga yang beragam tentang sikap aparat dalam pelayanan menunjukkan kepedulian dan keperhatian, sebab akan memunculkan berbagai pandangan. Tentunya hal itu sulit untuk di hindari. Kenyataan menunjukkan bahwa warga cukup puas dengan hasil yang mereka terima akan tetapi masih ada di dalam benak mereka masing-masing tentang pelayanan yang tentunya tidak semua dari warga merasa puas. Hal ini tentunya tidak bisa di hindari, sebab publik lah yang menilai.

Salah satu program kerja Pemerintah Kabupaten Gowa, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu. Nama kegiatan, pengadaan instalasi kotor. Nama pekerjaan, pekerjaan talud. Lokasi pekerjaan, Kelurahan Cikoro. Nilai kontrak, Rp. 135.623.000. Pelaksana CV. Bontolempangan. Yang mana pekerjaan talud tersebut, menurut Muh Basir sebelumnya mengatakan bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah CV.Akil Pratama tetapi yang tertera di papan informasi adalah CV. Bontolempangan.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Sekretaris lurah yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai sekretaris di Kelurahan ini merasa bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi pada masyarakat saya. Tetapi tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa saya beserta para staf telah memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat. Namun saya akui sikap para pegawai tidak dapat secara keseluruhan dapat di kontrol, hanya kepercayaan dan kesadaran diri dari para pegawai yang biasa di atasi sendiri oleh masing-masing”. (hasil wawancara oleh informan MS pada tanggal 23/02/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Birokrasi tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak dusun kelurahan cikoro yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan publik oleh aparat pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat” (hasil wawancara oleh informan HS pada tanggal 23/02/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa menunjukkan kinerja pelayanan publik di kantor Kelurahan Cikoro sudah berjalan Lumayan baik. Produktifitas pegawai Kelurahan

menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing, dan mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan permintaan masyarakat. Kinerja yang ditunjukkan dengan ketaatan pegawai kelurahan dalam menjalankan tugas sudah berjalan dengan cukup baik. Ketaatan mencakup ketaatan waktu, kode etik pegawai kelurahan, ketaatan terhadap pimpinan, dan ketaatan dalam menyelesaikan tugas. Kinerja pegawai dalam kerja sama sudah cukup baik. Kerja sama mendukung terlaksananya pelayanan yang cukup baik karena saling mendukung dan saling membagi pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pegawai sudah bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.

2. Kemampuan Adaptasi Kerja

Kemampuan adaptasi kerja dapat diketahui dari kemampuan program beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kemampuan program memberikan rangsangan semangat perubahan kepada warga masyarakat. Pada tahap sosialisasi dapat diamati perubahan cara pandang dan perubahan perilaku masyarakat dalam program PMBRW. Selanjutnya pada tahap pembentukan LKM-RW dapat diamati dari semangat kegotongroyongan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang mereka rencanakan.

Kemampuan adaptasi program pada tahap perencanaan dapat diketahui dari kesesuaian perencanaan dan tujuan program PMBRW dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kemampuan adaptasi program dapat diketahui bahwa

program PMBRW dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta sesuai harapan masyarakat.

Hal ini di sampaikan oleh informan bapak Lurah Cikoro yang mengatakan bahwa:

“Adaptasi, yang kami lakukan yaitu kemampuan kami dalam menanggapi dan menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat di kelurahan Cikoro” (hasil wawancara oleh informan MK pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa . Kemampuan lurah (pemerintah kelurahan) dalam menghadapi atau menanggapi perkembangan atau peningkatan banyaknya tugas cukup baik dimana setiap ada peningkatan tugas umumnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Kemampuan lurah atau pemerintah kelurahan menghadapi atau menanggapi adanya penugasan tertentu dari pemerintah atas (pusat/provinsi/kota/kecamatan) juga cukup baik dimana setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cukup efektif. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas atau bidang kewenangan lurah atau pemerintah kelurahan dapat ditangani dengan cukup efektif.

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu telah berjalan mulai tahun 2018 sampai sekarang, serta selama 3 tahun ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping PKH

Kecamatan Tompobulu. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyarakatan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Sekteratir Lurah Cikoro yang mengatakan bahwa:

“Potensi SDM pegawai kelurahan dimanfaatkan dan didayagunakan dengan cukup baik oleh lurah, dimana para pegawai ditempatkan pada satuan kerja sesuai dengan kompetensi” (hasil wawancara oleh informan MS pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dana/anggaran yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dapat direalisasikan atau digunakan dengan cukup tepat, namun capaian atau realisasinya untuk program/kegiatan tertentu ada yang tidak maksimal. Sarana kerja yang ada atau dimiliki pemerintah kelurahan digunakan secara tepat untuk pelaksanaan atau pencapaian realisasi program/kegiatan yang sudah ditetapkan, namun karena sarana kerja yang ada masih kurang memadai sehingga penggunaannya sering melebihi kapasitasnya.

Suatu organisasi pemerintah daerah menuntut adanya aparatur atau perangkat daerah yang memiliki kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu

cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa”

“saya melihat kemampuan aparat dalam melaksanakan kinerja pelayanan publik pada umumnya sama, akan tetapi dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur kepada warga kurang, ini disebabkan kemampuan aparat berbedabeda” (hasil wawancara oleh informan FR pada tanggal 24/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas Dewasa ini masyarakat sudah paham mengenai kinerja pemerintah, baik itu berupa sikap dan perilaku aparat sendiri maupun kemampuan dalam melakukan pelayanan. Penelitian di lapangan membuktikan bahwa pada kinerja aparat telah mendapat respon yang beragam, baik itu melalui media massa maupun secara langsung.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Cikoro memiliki kemampuan pegawai akan menentukan kinerja organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai. Karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan tenaga yang dimiliki, pimpinan dapat memberikan wewenang kepada bawahan. Pemberian wewenang kepada bawahan sangat penting dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja organisasi, dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan

kepada pegawai diharapkan tugas pekerjaan dalam penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seseorang bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai secara signifikan adalah factor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan pengawasan, dengan promosi jabatan dengan gaji. Sikap yang baik, ramah, dan sopan dari pegawai kelurahan akan membuat masyarakat merasa nyaman dan akan merasa diterima dengan baik oleh para pegawai kelurahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja ialah sifat atasan yang tidak mau mendengar keluhan dan pandangan pekerja dan mau membantu apabila diperlukan. Pekerja yang menerima penghargaan dari atasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian mereka sendiri akan lebih puas. Sumber ketidakpuasan kerja yang lain adalah sistem imbalan yang di anggap tidak adil menurut persepsi pegawai. Gaji yang diterima oleh setiap pegawai mencerminkan perbedaan tanggung jawab, pengalaman, kecakapan maupun senioritas.

Hal ini dijelaskan oleh infroman Sekretaris Lurah yang mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan

hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu” (hasil wawancara oleh informan MS pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, Melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan (job rotation), yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas yang lainnya (yang disesuaikan dengan job description). pemekaran (job enlargement), atau perluasan satu pekerjaan sebagai tambahan dan bermacam-macam tugas pekerjaan. Praktik untuk para pekerja yang menerima tugastugas tambahan dan bervariasi dalam usaha untuk membuat mereka merasakan bahwa mereka adalah lebih dari sekedar anggota dari organisasi.

Adapun salah satu program yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dalam tahun 2023 ini adapun mahasiswa yang mendapatkan anggaran dana dari kelurahan Cikoro yaitu Muh Haeril sebesar 21.000.000,00 selama masa kuliah untuk pembayaran SPP.

Hal ini juga disampaikan oleh informan bapak Dusun Kelurahan Cikoro yang mengatakan bahwa:

“Pemimpin dalam kepemimpinannya perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan kepada pegawainya” (hasil wawancara oleh infroman HS pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa ku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan atasan dapat mempengaruhi kesuksesan pegawai dalam berprestasi. Dengan kata lain gaya kepemimpinan atasan dapat berpengaruh pada kepuasan kerja pegawai dalam suatu organisasi. Beberapa penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai pernah dilakukan, dengan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan beberapa ahli menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai.

Hal ini dijelaskan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“sejauh ini disetiap kegiatan masyarakat Kelurahan Cikoro menurut saya sangat membantu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa bantuan tersebut berbentuk materil dan moril. Kenapa saya katakan sangat membantu, karena dengan bantuan yang diberikan seperti printer, perbaikan lokasi luar kantor, gorden, lokasi rapat yang terdapat diluar kantor juga merupakan hasil sumbangan dari masyarakat” (hasil wawancara oleh informan FR pada tanggal 24/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat membantu pihak kelurahan Cikoro dalam melaksanakan tugas kelurahan. Pihak kelurahanpun sangat meapresia keinginan masyarakat atau kesedian masyarakat untuk membantu pihak kelurahan. Lurah memiliki gaya kepemimpinan yang Otokratis. Hanya menyuruh pegawainya untuk menaati perintahnya tanpa melihat perasaan

pegawainya. Tidak hanya perasaan saja melainkan keadaan sekitar Kantor Kelurahan Baratajaya juga tidak direspon oleh Lurahnyanya.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Karyawan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi/perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, bahkan pengendali untuk mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan. Untuk itu penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pada dasarnya kepuasan kerja akan mempengaruhi kinerja dan produktifitas karyawan, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada kinerja organisasi.

4. Kemampuan Berlaba

Sebagaimana diketahui di era digital saat ini, masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai pihak yang hanya menerima pelayanan secara bersih saja. Pihak yang memberi layanan saat sekarang harus mampu memberdayakan keberadaan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima pelayanan begitu saja tetapi juga terlibat dalam proses kegiatannya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalam berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintahan

di desa. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Hal ini disampaikan oleh informan Bapak Lurah Cikoro yang mengatakan bahwa:

“Masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Kelurahan Cikoro yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh: dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih banyak yang tidak dengan `sadar membayarnya” (hasil wawancara oleh informan MK pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil di wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih kurang. Contoh masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan tidak memiliki uang. Banyak masyarakat dari luar Kelurahan Cikoro yang memiliki tanah di Kelurahan Cikoro, sehingga penarikan pajak dirasa sulit. Contoh tanah yang berada di wilayah wilayah Kelurahan Cikoro sebagian besarnya merupakan lahan investasi, sehingga lambannya membayar pajak yang dikarenakan mereka tinggal di luar kabupaten Gowa.

Hal ini juga di jelaskan oleh bapak dusun Cikoro yang mengatakan bahwa:

“pada kenyataanya kelurahan akan mudah dijelaskan bahwa kunci keberhasilan orang adalah usaha kerjasama bagi pencapaian tujuan organisasi tergantung seberapa looyal dan bertanggung jawab bapak lurah dan staf desa dalam melayanani keperluan masyarakat” (hasil wawancara oleh HS pada tanfggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Prestasi kerja yang telah dicapai akan mempengaruhi oranglain untuk melakukan hal yang sama dengan demikian maka hasil kerja didalam organisasi menjadi lebih baik. Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal sehingga dengan keterbatasannya menyebabkan manusia tidak dapat mencari pemenuhan kebutuhannya tanpa kerjasama dengan orang lain. Setiap pegawai yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain yang bekerja did alamnya maupun dengan pekerjaan dengan organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri ini dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.

Hal ini juga dijekaskan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“di RT saya kami menyediakan air bersih untuk masyarakat dalam, dimana setiap kepala keluarga akan dipungut biaya setiap bulannya. Disamping itu kami juga memiliki usaha penyewaan kursi dan tenda untuk acara-acara. Hasil yang didapatkan akan menjadi milik bersama, maksudnya milik masyarakat yang juga akan dipergunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan kegiatan masyarakat lainnya” (hasil wawancara oleh informan HJ pada tanggal 24/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu RT yang terdapat di Kelurahan Cikoro diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Cikoro godang telah mampu untuk mendatangkan income bagi wilayahnya sendiri. Sebagaimana disebutkan bahwa di Kelurahan Cikoro usaha air bersih milik masyarakat yang dipergunakan untuk masyarakat juga.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi selama efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat Kelurahan Cikoro adalah: untuk mengatasi hambatan pertama yang dihadapi oleh aparat desa dalam mewujudkan efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa di Kelurahan Cikoro, perangkat kelurahan hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan dengan meningkatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan.

5. Pencarian Sumber Daya

Pencarian Sumber Daya, dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena sebagai penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Dalam hal peningkatan pajak sumber daya aparatur yang sehat dan kuatlah yang diperlukan agar dapat menjalankan nota tagihan pajak kepada masyarakat dari rumah kerumah.

Pencarian Sumber Daya yang ditugaskan dalam memungut PBB di Kelurahan Cikoro adalah kepala lingkungan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang sebelumnya direkomendasikan oleh Lurah. Pelatihan tidak pernah diberikan kepada kepala lingkungan, Lurah hanya memberikan penyuluhan mengenai informasi tata cara pemungutan dan apa saja yang menjadi tugas kepala lingkungan sebagai petugas pemungut

pajak. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kerja kepala lingkungan kurang memadai. Sarana untuk kegiatan pemungutan menggunakan kendaraan pribadi kepala lingkungan mulai dari pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak, pelaporan ke kantor Lurah dan penyetoran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hal ini dijelaskan oleh informan Sekretaris Lurah yang mengatakan bahwa:

“sumber daya yaitu pendekatan diri juga dilakukan oleh sesama pegawai. Pendekatan dianggap mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menimbulkan rasa peduli sesama pegawai untuk dapat saling membantu. Peralihan PBB dari pusat ke daerah melibatkan Kelurahan untuk berpartisipasi melaksanakan pemungutan PBB” (hasil wawancara oleh informan MS pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa efektivitas organisasi pemerintah kelurahan sebagai pelaksana dalam hubungannya dengan peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk melihat keefektifan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak serta melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan. Sistem dan prosedur pemungutan harus bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dengan pelayanan publik yang bermutu. Sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan.

pengembangan pegawai adalah selain untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya terhadap tugas-

tugasnya maupun tanggung jawabnya terhadap organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, juga akan memberikan dasar dalam pencapaian tujuan jangka panjangnya dalam rangka peningkatan karier bagi dirinya sendiri sehingga produktivitas kerjanya (kinerjanya) dalam mencapai tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien.

Hal ini dijelaskan oleh informan bapak dusun yang mengatakan bahwa:

“pegawai Kelurahan melakukan pemungutan dengan cara datang ke rumah wajib pajak dengan memberikan lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang menunjukkan nominal besaran pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah proses pembayaran selesai maka Kepala Lingkungan memberi STTS sebagai bukti pembayaran PBB” (hasil wawancara oleh informan HS pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Mengenai penyuluhan pajak, Lurah dan Kepala Lingkungan mengakui belum pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat karena menganggap masyarakat sudah mengerti bagaimana proses pembayaran PBB di Kelurahan karena prosesnya mudah. Dalam penyesuaian diri terhadap tugas pemungutan PBB di Kelurahan maka dibutuhkan kerja sama antara anggota organisasi. Kerja sama penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, menghindari konflik dan dalam kaitannya dengan PBB dapat meningkatkan pembayaran PBB di Kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Th. 2009) penyelenggara pelayanan publik

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya terdiri atas: (1) organisasi penyelenggara pelayanan publik yang terdiri atas satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; dan (2) pelaksana pelayanan publik terdiri atas pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian kegiatan pelayanan publik. Sedangkan masyarakat yang terdiri atas seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini juga disampaikan oleh informan bapak Lurah Cikoro yang mengatakan bahwa:

“sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kami di Kelurahan masih banyak kurang pada awal pendirian kelurahan ini. Namun semua itu sangat dibantu oleh masyarakat yang mau membantu. Bantuan yang diberikan dapat beri uang dan selanjutnya kami juga meminta partisipasi masyarakat yang memiliki usaha di sekitar Kelurahan Tobek godang untuk mau membantu” (hasil wawancara oleh informan MK pada tanggal 23/01/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Cikoro sudah efektif dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Cikoro. Namun masih perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dalam melaksanakan pemungutan di Kelurahan Cikoro tidak memadai. Kepala lingkungan sebagai petugas pemungut pajak menggunakan kendaraan pribadi ketika memungut pajak, memberi laporan ke Kantor Lurah dan juga melakukan penyetoran ke BPKAD yang jaraknya terbilang cukup jauh dari rumah masing-masing Kepala Lingkungan. Tidak terdapat sarana pendukung yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dalam memenuhi tugas pemungutan PBB. Berdasarkan observasi peneliti terhadap sumber daya manusia yang berperan sebagai petugas pemungut pajak di Kelurahan yaitu Kepala Lingkungan dipilih sebagai perpanjangan tangan dari Lurah. Kepala Lingkungan yang juga masuk dalam struktur organisasi Kantor Lurah dinilai dekat dengan masyarakat dan sudah mengenal masyarakat di lingkungannya dengan baik sehingga Kepala Lingkungan ditunjuk menjadi petugas pemungut pajak.

C. Pembahasan

Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barangbarang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Hasibuan (dalam Busro, 2018), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan).

Sikap mental/perilaku aparat Kelurahan, Kemampuan, serta semangat kerja. Dari beberapa indikator tersebut, menunjukkan produktivitas aparat dalam melaksanakan pelayanan public di Kelurahan Cikoro dapat dikatakan baik. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang ada di Kelurahan Cikoro dapat dikatakan kurang berkualitas, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yakni aparat dan sarana dan prasarana terutama kantor kelurahan.

2. Kemampuan adaptasi kerja

Kemampuan adaptasi kerja dapat diketahui dari kemampuan program beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kemampuan program memberikan rangsangan semangat perubahan

kepada warga masyarakat. Pada tahap sosialisasi dapat diamati perubahan cara pandang dan perubahan perilaku masyarakat dalam program PMBRW. Selanjutnya pada tahap pembentukan LKM-RW dapat diamati dari semangat kegotongroyongan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang mereka rencanakan.

Keluarahn Cikoro sudah memiliki kemampuan adaptasi kerja yang cukup baik yaitu kemampuan pegawai akan menentukan kinerja organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai. Karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan tenaga yang dimiliki, pimpinan dapat memberikan wewenang kepada bawahan. Pemberian wewenang kepada bawahan sangat penting dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja organisasi, dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan kepada pegawai diharapkan tugas pekerjaan dalam penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka. Dengan demikian kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi, atau tingkat rasa puas individu karena mendapatkan imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka

berada. Prestasi kerja menurut Steers (2003) adalah suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepuasan kerja di kantor Cikoro yaitu Karyawan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi/perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, bahkan pengendali untuk mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan. Untuk itu penting untuk memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pada dasarnya kepuasan kerja akan mempengaruhi kinerja dan produktifitas karyawan, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada kinerja organisasi.

4. Kemampuan Berlaba

Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sekelompok orang yang memberikan pelayanan tersebut adalah aparat birokrasi pemerintah. Sedangkan menurut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 tahun 1993, pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi selama efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat Kelurahan Cikoro adalah: untuk mengatasi hambatan pertama yang dihadapi oleh aparat desa dalam mewujudkan efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa di Kelurahan Cikoro, perangkat kelurahan hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan dengan meningkatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan.

5. Pencarian Sumber Daya

Pencarian Sumber Daya, dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena sebagai penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Dalam hal peningkatan pajak sumber daya aparatur yang sehat dan kuatlah yang diperlukan agar dapat menjalankan nota tagihan pajak kepada masyarakat dari rumah kerumah.

Kelurahan Cikoro sumber dayanya sudah cukup baik dan memang tidak terdapat dasar peraturan yang mengatur tentang pemilihan sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pemungut pajak. Di beberapa kota/desa lainnya di Indonesia, Kepala Lingkungan atau Kepala Desa yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan pemungutan ini. Kepala Lingkungan

datang ke rumah masing-masing wajib pajak dan menyampaikan SPPT dinilai akan meningkatkan penerimaan PBB di suatu Kelurahan/Desa karena proses pembayaran pajaknya lebih mudah, cepat, dan tidak bertele-tele. Hal ini pula yang menyebabkan Kepala Lingkungan ditunjuk sebagai petugas pemungut pajak di Kelurahan Tosuraya Barat guna meningkatkan efektivitas Kelurahan dalam meningkatkan pembayaran PBB



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas yaitu

1. Produktivitas aparat dalam melaksanakan transparansi dan produktivitas penggunaan anggaran di Kelurahan Cikoro dapat dikatakan baik.
2. Kemampuan adaptasi kerja Kelurahan Cikoro sudah memiliki kemampuan adaptasi kerja yang cukup baik yaitu kemampuan pegawai akan menentukan kinerja organisasi dalam melakukan penggunaan anggaran. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai
3. Kepuasan kerja di kantor Cikoro yaitu Karyawan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi/perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, bahkan pengendali untuk mewujudkan tujuan organisasi perusahaan dalam pengelolaan anggaran kelurahan agar terlaksana dengan baik.
4. Kemampuan berlabar Kelurahan Cikoro, perangkat kelurahan hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan dengan meningkatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan.
5. Kelurahan Cikoro sumber dayanya sudah cukup baik dan memang tidak terdapat dasar peraturan yang mengatur tentang pemilihan sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pemungut pajak

B. Saran

1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan
2. Diharapkan Staf dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Serta memperluas ilmu pengetahuan sehingga petugas dapat memberikan informasi dengan mudah kepada pemustaka.
3. Sosialisasi yang merata dan menyeluruh harus segera pemerintah lakukan dengan cepat dan tanggap. Hal tersebut harus segera dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang penggunaan pelayanan berbasis teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87-102.
- Assa, C. M., Lapian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Faradisha, S. A., Widyastuti, Y., & Nugroho, K. S. (2017). *Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Hutapea, C. (2022). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021 (Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 170-186.
- Jannah, Z. (2021). *Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Korengkeng, R. A., Tulusan, F. M. G., & Plangiten, N. N. (2023). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9(3).
- Khan, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9–14. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6246>
- Krisnawati, N. M. G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N. P., & Krisantina, N. M. A. P. (2019). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 37–46. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19934>
- Londa, J. S. S. A. L. V. Y. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 61–73.

Permata, N. D. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019-2021.

Prakoso, A. (2017). Sosiologi hukum.

Salindeho, A. C. (2020). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).

Safi', Indien Winarwati, E. R. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>

Sempo, J. S., Laloma, A., & Londa, V. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95).

Sugianto, S. (2019). Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber APBN dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran berbasis Pemerataan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus di Wilayah Ciayumajakuning). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri*.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yudokusumo, A. B. (2014). Pelaksanaan Good Corporate Governance Di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2, 1-11.

Yuliana, N. S. (2013). Implimentasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaraan. *Journal Of Chemical Information and Modaling*, 53 (9), 1689-1699. Khan, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9–14. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6246>

Krisnawati, N. M. G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N.

- P., & Krisantina, N. M. A. P. (2019). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 37–46. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19934>
- Londa, J. S. S. A. L. V. Y. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 61–73.
- Safi', Indien Winarwati, E. R. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Sumolang, S. G., Saerang, I. S., Maramis, J. B., Perencanaan, E., Desa, D., Desa, D. I., & Kecamatan, S. E. A. (2021). *KABUPATEN MINAHASA THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND PLANNING IN SEA VILLAGE PINELENG DISTRICT MINAHASA REGENCY* *Jurnal EMBA Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 973-982* *Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan , kegi.* 9(4), 973–982.
- Umiani, W. O., & Sujana, I. W. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2747–2779), 16–35.
- Zulaida, N., & Nurmala Sari, E. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.* UMSU.
- Zulaida, N., & Nurmala Sari, E. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fahril Yusuf

Nim : 105641111317

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Februari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhidayah Hum, M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Fahril Yusuf 105641111317

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source	2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	aenalfuadadam.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB II Fahril Yusuf 105641111317

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	5%
3	repository.uisu.ac.id Internet Source	4%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
5	publikasiilmiah.ums.ac.id:8080 Internet Source	2%
6	ejournal.polraf.ac.id Internet Source	2%
7	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB III Fahril Yusuf 105641111317

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper		2%
2	media.neliti.com Internet Source		2%
3	id.scribd.com Internet Source		2%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source		2%
5	text-id.123dok.com Internet Source		2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB IV Fahril Yusuf 105641111317

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		6%
2	www.samarinda.lan.go.id Internet Source		2%
3	jurnal.unigal.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Fahril Yusuf 105641111317

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
--	-----------



Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fahril Yusuf, Lahir di kabupaten gowa, provinsi Sulawesi selatan, pada tanggal 27 September 1999. penulis lahir dari pasangan M. Yusuf dan Arifah merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Pada tahun 2005 penulis masuk sekolah dasar swasta (MI) madrasah iptidaiyah lembang bu'ne, dan lulus pada tahun 2011. kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di (MTS MUHAMMADIYAH LEMBANG BU'NE) dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2014. selanjutnya masuk sekolah menengah akhir di SMA NEGRI 1 TOMPOBULU dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama penulis di terima menjadi mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, di Universitas MUHAMMADIYAH Makassar. bulan november 2020 sampai bulan Januari 2021 mengikuti kuliah kerja profesi (kkp) di desa Maccini baji, kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi selatan. Tanggal 27 Februari 2024 penulis di nyatakan lulus dan berhak menyandang sarjana ilmu politik (SIP).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "efektivitas penggunaan anggaran di kelurahan cikoro kabupaten Gowa"